

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan pasar di Pasar Demangan secara umum sudah berjalan dengan baik. Aspek-aspek dalam pengelolaan pasar di Pasar Demangan sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Petugas-petugas yang berperan dalam pengelolaan retribusi pasar terkoordinasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kinerja petugas pemungut retribusi yang disiplin dalam memungut retribusi di Pasar Demangan sesuai dengan instruksi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) I Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Aspek evaluasi dan pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengontrol kinerja petugas di lapangan serta mengawasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta antara lain kurangnya kesadaran pedagang dalam hal

pembayaran kewajiban retribusi sehari-hari, adanya pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tepi Jalan Gejayan sehingga menjadikan lingkungan pasar kurang tertib, selain itu keterbatasan dana dari pemerintah dan kurangnya petugas pungut menjadi masalah internal yang harus mendapat perhatian untuk segera ditangani.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah

- a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara pedagang yang berijin dan tidak berijin.
- b. Memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar Demangan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaiki namun masih juga mengalami kerusakan yang sama. Lahan parkir di area Pasar Demangan juga harus segera mendapat perhatian karena sempitnya lahan parkir membuat pedagang maupun pembeli terpaksa memanfaatkan ruas Jalan Gejayan sebagai tempat parkir kendaraan sehingga sering menimbulkan kemacetan.

2. Pedagang

Membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dari retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fernandez, Joe. 2002. *Otonomi Daerah Di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta: IPCOS.
- Hani Handoko, T. 2001. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: PBF.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Kaho, Josef, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isna Muidlotin Hasanah. 2005. *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang*. Skripsi. Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Luthfi J. Kurniawa, dkk. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Malang: In-Trans.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis Hanif, Enceng & Zainul Ittihad Amin. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sarudajang, S.H. 2003. *Birokasi dalam Otonomi Daerah; Upaya mengatasi keagalannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siswanto, H.B. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujamto. 1993. *Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaukani, Afan Gaffar & M. Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Internet

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999).

http://djkd.depdagri.go.id/?tabel=apbd_pendapatan&jenis=1&kodeprov=1 diakses pada 1 Maret 2012.

<http://jogja.tribunnews.com/2011/11/19/para-pedagang-pasar-demangan-keuhkan-bau-sampah-dan-air-hujan> diakses pada 15 Maret 2012.

<http://jogja.tribunnews.com/2011/11/18/pasar-demangan-bau-dan-kotor> diakses pada 15 Maret 2012.

<http://id.wikipedia.org> diakses pada 3 April 2012.